

PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK) DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DI KELURAHAN TALUN KECAMATAN SUMEDANG UTARA KABUPATEN SUMEDANG

Nadia Marsa Zahira

Universitas Sebelas April

Article Info

Article history:

Received April 12, 2026

Revised Mei 20, 2026

Accepted Juni 16, 2026

Keywords:

Community Empowerment
Community Empowerment
Institutions
Community Participation
Participatory Development

ABSTRACT

The Village Community Empowerment Institution (LPMK) is an institution formed by the village to support community empowerment and strengthen citizen participation in the development process at the village level. This study aims to analyze the role of LPMK as a forum or community aspirations in development and a driver of community participation in Talun Village, North Sumedang District, Sumedang Regency using the theory of Sunyoto Usman (2004), which includes 4 main dimensions, namely: the role of LPM as a facilitator, the role of LPM as a mediator, the role of LPM as a motivator and the role of LPM as a dynamicator. The method used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The technique for determining research informants is purposive sampling with informants consisting of the Village Head, Village Secretary, Head of Community Empowerment, Head of LPMK, and the community. Data collection techniques include literature studies and field studies through observation, interviews, and documentation. Data processing procedures include data reduction, data display, conclusion drawing/verification, and triangulation. The results of the study showed that LPMK was quite good at encouraging community participation through mentoring, development proposals, program supervision, and coordination with RT, RW, and sub-districts. The obstacles faced included budget limitations and low community understanding of self-reliance. Obstacles were overcome through fundraising, mutual cooperation, effective communication, and strengthening the role of LPMK in Musrenbang..



Copyright © 2026 JRPA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Nadia Marsa Zahira,
Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sebelas April
Jl. Angkrek Situ, No. 19 Sumedang.
Email: nadiamarsa24@gmail.com

1. INTRODUCTION

Pembangunan telah mendorong perubahan dalam kehidupan masyarakat dengan membuka lebih banyak peluang untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan. Konsep pembangunan partisipatif menjadi tujuan bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat.

Pembangunan partisipatif merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha yang dilakukan oleh pemerintah, sektor swasta dan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan yang membawa pertumbuhan dan perubahan yang berencana kearah yang lebih baik. Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh dengan memperhatikan kebutuhan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan demikian, pembangunan harus memperhatikan pemerataan, agar tidak ada satu pun individu atau kelompok yang tertinggal dalam menikmati hasil pembangunan.

Pembangunan partisipatif memiliki tujuan dari beberapa aspek penting yang saling berkaitan, di antaranya yaitu memberikan gambaran yang jelas mengenai sasaran dan tujuan pembangunan, serta berfungsi sebagai pedoman dalam pengalokasian sumber daya manusia dan anggaran yang diperlukan. Selain itu, pembangunan juga dapat dijadikan acuan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan publik, sehingga efektivitas program dapat diukur dengan baik. Pembangunan yang ideal mendorong partisipasi publik, baik dari mitra kerja maupun masyarakat, sehingga perencanaan dapat diarahkan untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Pembangunan yang ideal berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan, adil, dan inklusif, di mana masyarakat terlibat aktif dalam setiap tahap, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Pembangunan ini harus berbasis pada kebutuhan lokal, memperhatikan kesetaraan dan keadilan sosial, serta mempertimbangkan aspek lingkungan untuk memastikan keberlanjutan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya sangat penting, diiringi dengan pemberdayaan masyarakat untuk mengambil keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan demikian, partisipasi masyarakat menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan partisipatif yang diharapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Namun dalam pelaksanaannya pembangunan yang bersifat partisipatif tidak selalu berjalan lancar. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pembangunan partisipatif di Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang yaitu rendahnya partisipasi warga dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Banyak warga yang tidak hadir dalam musyawarah perencanaan, kurang terlibat dalam kegiatan fisik seperti kerja bakti, serta tidak memberikan masukan atau umpan balik terhadap hasil pembangunan yang akan menghambat kegiatan pembangunan, sehingga masyarakat tidak merasa memiliki peran atau tanggung jawab dalam mewujudkan pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Tabel 1. Data Program Pembangunan Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang

No	Program	Jumlah
1.	Perbaikan Jalan	6
2.	Perbaikan Posyandu	2
3.	Pembangunan TPS	1
4.	Perbaikan Drainase	1

Sumber: Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang 2022-2024

Berdasarkan tabel 1 dijelaskan bahwa Program yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang seperti, perbaikan jalan, perbaikan posyandu, pembangunan TPS dan perbaikan drainase.

Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) idealnya harus dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan menggerakkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. LPMK berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan warga, memastikan bahwa aspirasi masyarakat terakomodasi dalam rencana pembangunan dan mendorong transparansi serta akuntabilitas. Selain itu, LPMK juga bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan program-program pembangunan, memfasilitasi dialog antar pemangku kepentingan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan tercapai dan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk perbaikan di masa mendatang.

Namun berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan adanya indikasi atau fenomena masalah yang berkaitan dengan belum optimalnya peran LPMK dalam pembangunan partisipatif di Kelurahan Talun

Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang dengan indikasi atau fenomena masalah sebagai berikut:

1. Menurut Prasetyo (2020: 58-60) menyoroti bahwa peningkatan kapasitas SDM yang tidak disesuaikan dengan kondisi lokal dan konteks masyarakat dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan program pembangunan. Pelatihan yang hanya berfokus pada teori dan tidak memperhitungkan tantangan riil yang dihadapi masyarakat sering kali tidak memberi dampak nyata. Jika pelatihan yang diberikan tidak relevan, maka kemampuan SDM yang dilatih akan terbatas dalam mengimplementasikan program pembangunan. Namun, LPMK di Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang pada pelaksanaannya masih belum optimal dalam meningkatkan kapasitas SDM termasuk pelatihan dan pembinaan SDM, seperti yang diungkapkan oleh salah satu anggota LPMK di Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang.
2. Menurut Mardikanto (2004: 112-114), mengemukakan bahwa sosialisasi kegiatan pembangunan berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara LPM dan masyarakat. Proses sosialisasi yang baik akan menciptakan transparansi dan akuntabilitas, sehingga masyarakat merasa dilibatkan dan memiliki rasa kepemilikan terhadap program pembangunan. Namun, LPMK di Kelurahan Talun masih belum optimal dalam melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, terlihat dari kurangnya keterlibatan masyarakat dan minimnya informasi yang disampaikan. Hal ini mengakibatkan masyarakat tidak sepenuhnya mengetahui kegiatan pembangunan, sehingga mengurangi partisipasi dan dukungan mereka terhadap program-program yang direncanakan, seperti yang diungkapkan oleh salah satu anggota LPMK Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang.
3. Menurut Rukmana (2008: 91-93), penyusunan strategi pembangunan yang jelas dan terarah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Namun, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) masih belum optimal dalam menyusun strategi yang efektif untuk mengajak masyarakat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan, seperti yang dijelaskan oleh salah satu anggota kelompok LPMK Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang.

Adapun fokus penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Dalam Meningkatkan Pembangunan Partisipatif Di Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang difokuskan pada dimensi peran fasilitator, peran mediator, peran motivator dan peran dinamisor.
2. Faktor yang menghambat Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Dalam Meningkatkan Pembangunan Partisipatif Di Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang difokuskan pada dimensi peran fasilitator, peran mediator, peran motivator dan peran dinamisor.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Dalam Meningkatkan Pembangunan Partisipatif Di Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang difokuskan pada dimensi peran fasilitator, peran mediator, peran motivator dan peran dinamisor.

2. METHOD

Dalam penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif atau sering disebut dengan metode naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (Natural Setting) dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generasi. Penelitian kualitatif yaitu penelitian dengan menggunakan riset yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis. Perspektif subjek lebih ditonjolkan ketika menggunakan penelitian kualitatif. Landasan teori bisa dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Menurut Sugiyono (2017: 9) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) Dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data dan sifat induktif, kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor (Moleong 2012: 4) mengemukakan bahwa “metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”

Menurut Sugiyono (2018: 297), Subjek penelitian adalah pihak yang berkaitan dengan yang diteliti untuk mendapatkan informasi terkait data penelitian yang merupakan sampel dari sebuah penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan. Sampel dalam penelitian kualitatif, juga bukan disebut sampel statistic, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori. Teknik yang digunakan dalam menentukan subjek penelitian adalah Teknik Purposive sampling. Menurut Sugiyono (2018: 301),

purposive sampling adalah Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti. Informan penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. Dalam penelitian ini menentukan informan dengan menggunakan teknik purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang benar-benar mengetahui tentang Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dalam Meningkatkan Pembangunan Partisipatif di Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang. Maka yang dijadikan informan adalah sebagai berikut.

Table 2. Subjek Penelitian

No.	Unsur/Jabatan	Jumlah
1.	Lurah Kelurahan Talun	1
2.	Sekretaris Kelurahan Talun	1
3.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	
4.	Ketua LPMK	1
5.	Masyarakat	1
Jumlah		5

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi fakta-fakta atau informasi penting tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang. Oleh karena itu, diperlukan rincian data yang dikumpulkan berupa data primer maupun sekunder. Definisi data primer adalah data yang langsung diamati dilapangan melalui wawancara mendalam. Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah diolah dan dipublikasikan dari dokumen dan media pemberitaan resmi. Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2020: 63), merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Oleh karena itu, dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang diperoleh dari berikut data ini:

1. Studi Kepustakaan yang dilakukan peneliti melalui sumber-sumber yang akurat dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
2. Studi Lapangan yaitu pengumpulan data secara langsung dengan meneliti secara mendalam yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini, dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:
 - a. Observasi, yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung ke lapangan mengenai objek yang diteliti, dengan tujuan untuk lebih memahami dan mendalami masalah-masalah yang terjadi.
 - b. Wawancara, yaitu mengadakan aktivitas tanya jawab secara langsung dengan koresponden (pihak-pihak yang terkait dalam penelitian).
 - c. Dokumentasi, yaitu pencatatan suatu objek yang diteliti serta diolah, sehingga menjadi sekumpulan barang bukti yang dapat ditampilkan apabila dibutuhkan. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, suara.
 - d. Triangulasi yang diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Triangulasi teknik, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi untuk sumber yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang ditemukan

3. RESULTS AND DISCUSSION

Peran merupakan sebuah gambaran mengenai fungsi, kontribusi, atau keterlibatan suatu pihak atau elemen dalam mencapai tujuan tertentu. Ketika suatu proses dijalankan untuk meraih hasil yang diharapkan, peran menjadi penentu arah keterlibatan dalam setiap tahapan kegiatan. Peran dapat dinilai dari seberapa besar pengaruh dan tanggung jawab yang diemban dalam upaya mewujudkan tujuan. Semakin jelas dan signifikan peran yang dijalankan, maka semakin besar kontribusinya terhadap keberhasilan keseluruhan proses tersebut.

Pembangunan partisipatif merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha yang dilakukan oleh pemerintah, sektor swasta dan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan yang membawa pertumbuhan dan perubahan yang berencana kearah yang lebih baik. Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh dengan memperhatikan kebutuhan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Dengan demikian, pembangunan harus memperhatikan pemerataan, agar tidak ada satu pun individu atau kelompok yang tertinggal dalam menikmati hasil pembangunan.

Dalam hal ini, peneliti ingin memahami bagaimana Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dalam Meningkatkan Pembangunan Partisipatif di Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang dengan menggunakan peran menurut Sunyoto Usman (2004:19), yaitu sebagai berikut:

- a. Peran LPM sebagai fasilitator
- b. Peran LPM sebagai mediator
- c. Peran LPM sebagai motivator
- d. Peran LPM sebagai dinamisator

Berikut adalah hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dalam Meningkatkan Pembangunan Partisipatif di Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang menggunakan teori Sunyoto Usman (2004:19), yaitu sebagai berikut:

1. Peran LPM sebagai fasilitator

Di dalam dimensi ini terdapat dua indikator yaitu pendampingan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kapasitas SDM. LPM berperan penting dalam mendampingi masyarakat mulai dari menampung aspirasi di tingkat RT dan RW, memfasilitasi diskusi untuk merumuskan kebutuhan pembangunan, serta membantu menyusun proposal usulan yang diajukan ke kelurahan. Selain itu, LPM juga mengawasi pelaksanaan pembangunan agar sesuai rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi warga. Peran tersebut didukung oleh bukti dokumentasi berupa dokumen proposal kegiatan yang menunjukkan keterlibatan aktif LPM dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat kelurahan. Peran LPMK di Kelurahan Talun fokus pada kegiatan pemberdayaan masyarakat. Namun, hingga kini belum ada pelatihan atau pembinaan khusus yang ditujukan untuk LPMK, termasuk dalam hal pengembangan sumber daya manusia.

2. Peran LPM sebagai Mediator

Di dalam dimensi ini terdapat dua indikator yaitu koordinasi program pembangunan dan sosialisasi program pembangunan. Koordinasi LPMK di Kelurahan Talun berjalan dengan baik sebagai mitra pemerintah. Secara rutin, sosialisasi dilakukan dengan RT/RW dan peran aktif dijalankan dalam mengkoordinasikan permasalahan lingkungan kepada pihak kelurahan. Selain itu, pertemuan rutin diadakan dengan pihak kelurahan untuk menyampaikan dan memperoleh informasi terkait program-program pembangunan.

LPMK rutin melaksanakan sosialisasi pembangunan kepada RT/RW setiap tiga bulan sekali. Selain itu, koordinasi dengan pihak kelurahan dilakukan terkait sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat. Pertemuan juga dilakukan secara rutin untuk membahas perkembangan dan kebutuhan pembangunan di Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang.

3. Peran LPM sebagai Motivator

Di dalam dimensi ini terdapat dua indikator yaitu kemampuan komunikasi dan kemampuan inspiratif. LPMK telah menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat dalam mensosialisasikan program-program pembangunan.

LPMK berperan aktif menginspirasi masyarakat melalui sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat, mengangkat potensi lingkungan untuk kesejahteraan, serta memberi solusi dan mendukung pembangunan di RT/RW Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang.

4. Peran LPM sebagai dinamisator

Di dalam dimensi ini terdapat dua indikator yaitu penyusunan strategi pembangunan dan inovasi pembangunan. LPMK berperan dalam penyusunan strategi pembangunan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Namun, sebagian besar strategi pembangunan masih berasal dari inisiatif dan arahan pihak

kelurahan. Inovasi yang dilakukan LPMK masih terbatas dan belum sepenuhnya menjangkau seluruh lingkungan di Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang.

Peran merupakan suatu bentuk keterlibatan atau kontribusi yang dijalankan oleh individu, kelompok, atau elemen tertentu dalam suatu proses untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ketika suatu pihak menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sesuai dengan kebutuhan dan arah pencapaian, maka dapat dikatakan bahwa pihak tersebut telah menjalankan perannya dengan baik. Peran sendiri dapat menunjukkan sejauh mana seseorang atau sesuatu mampu memberikan dampak terhadap keberhasilan suatu tujuan, semakin besar keterlibatan dan pengaruh yang diberikan, maka semakin penting pula peran tersebut dalam keseluruhan proses pencapaian. Sebagaimana menurut Chambers (2005: 10-12) menyatakan bahwa pembangunan partisipatif adalah proses di mana masyarakat secara aktif terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan memberdayakan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa LPMK cukup baik dalam mendorong partisipasi masyarakat melalui pendampingan, usulan pembangunan, pengawasan program, serta koordinasi dengan RT, RW, dan kelurahan. Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang swadaya. Hambatan diatasi dengan mengusulkan program Dana Desa melalui musyawarah dan perencanaan matang, gotong royong, komunikasi efektif, serta penguatan peran LPMK dalam kegiatan Musrenbang.

4. CONCLUSION

Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam meningkatkan pembangunan partisipatif di Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang sudah dilaksanakansesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Peran LPMK bias dikatakan sudah cukup baik karena berjalan sesuai dengan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), pada Pasal 4 dan 5 dijelaskan bahwa tugas dan fungsi LPMK adalah membantu Pemerintah Kelurahan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program - program pembangunan yang dapat memberdayakan masyarakat. LPMK juga berfungsi sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam upaya pemberdayaan masyarakat, baik dalam hal pengembangan sumber daya manusia, peningkatan ekonomi, maupun pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Peran LPMK dalam meningkatkan pembangunan partisipatif di Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang sudah maksimal. Peran ini mengacu pada teori Sunyoto Usman (2004:19) yang mencakup empat dimensi utama yaitu peran LPM sebagai fasilitator, mediator, motivator, dan dinamisator. Temuan menunjukkan bahwa LPM berperan aktif sebagai fasilitator dengan mendampingi masyarakat menampung aspirasi di tingkat RT dan RW, memfasilitasi diskusi, serta membantu menyusun proposal usulan ke kelurahan, dan mengawasi pelaksanaan pembangunan agar sesuai rencana. Namun, peningkatan kapasitas SDM belum dilakukan melalui pelatihan. Sebagai mediator, LPMK menjalankan koordinasi dengan kelurahan melalui sosialisasi rutin dan pertemuan-pertemuan. Dalam peran motivator, LPMK menjalin komunikasi efektif dan menginspirasi warga melalui kegiatan pemberdayaan. Sebagai dinamisator, LPMK terlibat dalam strategi pembangunan, meskipun masih terbatas dan belum merata. Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan anggaran, kendala komunikasi akibat rendahnya pemahaman masyarakat, ketiadaan pelatihan komunikasi, dan keterbatasan media komunikasi yang menghambat peran LPMK sebagai penghubung dan penggerak partisipasi. Upaya mengatasi hambatan ini dilakukan dengan mengusulkan program Dana Desa melalui musyawarah dan gotong royong, memastikan komunikasi efektif antara masyarakat dan kelurahan, mensosialisasikan pentingnya partisipasi, serta mengorganisir forum diskusi agar kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan hasil Musrenbang.

REFERENCES

- Akadun. 2009. *Pemberdayaan Birokrasi Pemerintah, Upaya Peningkatan Kinerja Pelayanan Pemerintah Yang Efektif*. Bandung: CV. Maulana.
- Arifin, Z. (2012). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(3), 45-56.
- Azkiya, N., & Kriswanto, A. (2024). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Mendorong Pembangunan Partisipatif di Tingkat Kelurahan. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 5(4), 724-739.

- Chambers, R. (2005). *Participatory approaches to development: A synthesis of the literature* (pp. 10–12). Brighton: Institute of Development Studies.
- Firana. 2011. *Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Program Penyelenggaraan Pembangunan Pemerintah di Kelurahan Karas Kecamatan Galang Kota Batam*. Skripsi. Tanjungpinang: Universitas Maritim Ali Haji.
- Fuasy, Khairul, & Surur, F. (2020). Hubungan pengembangan kawasan bisnis dan pariwisata terpadu di Kota Makassar terhadap kawasan pesisir Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. *Jurnal SOLMA*, 9(1), 102-112. Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Hakim, S. (2015). *Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan: Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Hidayat, T. (2014). *Penguatan Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Administratif di Daerah Perdesaan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Irawan, E. P. (2015). Peran LPMK berpengaruh terhadap pembangunan partisipatif. *Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 10(2), 45-60.
- Moleong, L. (2015). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revi). Bandung: PT Remaja.
- Risfaisal, Nawir, M., Azis, F., Kaharuddin, Sari, N., & Abdusalam. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Optimalisasi Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kelurahan. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 13(3), 620–632.
- Rukmana, D. (2008). *Penyusunan strategi pembangunan yang jelas dan terarah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat*. Jakarta: Penerbit Rajawali.
- Setiawan, A. (2020). *Pembangunan Sosial dan Partisipasi Masyarakat: Dampak Keterlibatan dan Ketidakikutsertaan dalam Organisasi*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta
- Sunyoto Usman. 2004. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pitaloka.Yuntika. 2021. *Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Sebagai Mitra Pemerintahan Desa Dalam Pembangunan Partisipatif Di Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang*. Skripsi. Sumedang: STIA Sebelas April Sumedang.